



**RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II RENCANA KERJA

### Pasal 2

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

- (3) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 21 September 2020



Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 21 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 135 Seri D



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa

setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan surat Bupati Malang Nomor: 005/1032/35.07.032/2019, tanggal 5 Desember 2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 April 2020 Nomor: 005/2603/35.07.202/2020 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/3002/35.07.202/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Serta Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor: 050/3634/35.07/202/2020 tentang penyesuaian pagu indikatif, Target Program/kegiatan Dalam Rangka Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Pada tahap sebelumnya telah dilaksanakan tahapan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi, penyusunan Rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, menyusun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan dan sasaran. Penyusunan Renja dilaksanakan setelah dilaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, perumusan kegiatan prioritas, penyajian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah, penyesuaian dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan

kebijakan umum pembangunan daerah. Pada Rencana Kerja ini dilakukan updating tentang isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021. Tema Pembangunan Tahun 2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Malang yang Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pengembangan Potensi Desa Wisata serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”**.

Kaitan tema tersebut dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan pengembangan ekonomi di lingkungan masyarakat. Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2022, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021, dan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

tahun berkenaan. Di tingkat Dinas/Badan, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2021;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2021; dan
3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah ditahun 2021 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan;
2. Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2021; dan
3. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah antar bidang khususnya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

### BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RenstraBadan Pendapatan Daerah**

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis atas kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada **tabel 2.1** berikut ini:



Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

## Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-5+7+9	11-10/4	
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	20%	20%	19.21 %	99.2	20 %	59,20%	59,20%	
1		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	39500 buah	31000 buah	8500 buah	8354 buah	98.28	8500 buah	47854 buah	30.28%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80.00%	
4	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	424 jenis	168 jenis	10 jenis	10 jenis	100	146 jenis	324 jenis	76.42%	
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	53868 HOK	11750 HOK	8368 HOK	8368 HOK	100	4190 HOK	24338 HOK	48.18%	
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	505 OB	3930 OB	11080 OB	10295 OB	92.92	651 OB	14876 OB	74.26%	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-5+7+9	11-10/4
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	650 HOK	930 HOK	750 HOK	750 HOK	100	392 HOK	2072 HOK	76,92%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	224 jenis	51 jenis	13 jenis	13 jenis	100	10 jenis	74 jenis	33,04%
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	510 jenis	188 jenis	72 jenis	72 jenis	100	75 jenis	335 jenis	65,69%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	525 HOK	338 HOK	633 HOK	633 HOK	100	235 HOK	1206 HOK	59,71%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	70 jenis	12 jenis	2 jenis	2 jenis	100	4 jenis	18 jenis	25,71%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	150 jenis	82 jenis	43 jenis	43 jenis	100	40 jenis	165 jenis	110 %
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>20 %</b>	<b>20 %</b>	<b>18,52 %</b>	<b>98,52</b>	<b>20 %</b>	<b>58,52%</b>	<b>58,52%</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	70 jenis	24 jenis	57 jenis	57 jenis	100	5 jenis	86 jenis	30,71%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	320 unit	237 unit	277 unit	277 unit	89,64	236 unit	750 unit	58,59%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	636 jenis	159 jenis	47 jenis	47 jenis	100	7 jenis	213 jenis	33.49
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 jenis	40 jenis	15 jenis	15 jenis	100	12 jenis	67 jenis	67.00
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	100 jenis	34 jenis	7 jenis	7 jenis	100	24 jenis	65 jenis	65.00
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	57 unit	59 unit	5 unit	5 unit	100	0 unit	64 unit	28.7%
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 unit	0.00
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	190 jenis	46 jenis	8 jenis	8 jenis	100	1 jenis	55 jenis	28.95
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
1	Pengadaan Pakaihan Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaihan Olahraga/ Batik (Stel)	1670 stel	1130 stel	427 stel	427 stel	100	0 stel	1557 stel	93.23
2	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaihan Dinas (Stel)	1340 stel	800 stel	0 stel	0 stel	0	0 stel	800 stel	59.70

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 20119	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
	<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>16.95 %</b>	<b>84.75%</b>	<b>20%</b>	<b>56.95%</b>	<b>56.95%</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan   orang	40 orang	207 orang	224 orang	190 orang	84.82	200 orang	597 orang	37.31%
	<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20.82 %</b>	<b>104.1</b>	<b>20%</b>	<b>60.82%</b>	<b>60.82%</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	488 buku	158 buku	75 buku	54 buku	72	12 buku	224 buku	45.90
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	472 buku	104 buku	12 buku	12 buku	100	4 buku	130 buku	25.42
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	162 buku	14 buku	6 buku	6 buku	100	1 buku	21 buku	12.96
	<b>VI. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD</b>	<b>Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti</b>	<b>400%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>	<b>60 %</b>	<b>75.00%</b>
1	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti	100%	20%	20%	20%	100	20%	60%	60.00

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
3	Verifikasi dan Validasi	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=10/4
3		Perentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	90%	20%	20%	20%	100	20%	60%	66,67
2		Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	48 buku	60 buku	12 buku	12 buku	100	27 buku	99 buku	51,56
	<b>VII. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>Tingkat layanan PBB</b>	<b>400%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>22,56 %</b>	<b>112,83</b>	<b>20 %</b>	<b>62,56%</b>	<b>78,21%</b>
1		Optimalisasi Penerimaan PBB P2	400%	100%	100%	112,83 %	112,83	100%	312,83%	78,21
2		Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	5505276 op	1392226 op	1391165 op	1397381 op	100,45	1397381 op	4186988 op	76,05
3		Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	320 Desa	390 Desa	390 Desa	390 Desa	100	390 desa	390 desa	121,88
4		Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	4 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	100	1 aplikasi SIM PBB	3 aplikasi SIM PBB	75,00

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=5+7-9	11=10/4
5	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	5305276 op	1515390 op	1391165 op	1391165 op	100	1397361 OP	4303936 OP	78,18
6	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	132 desa	33 desa	15 desa	15 desa	100	305 desa	353 desa	267,42
	<b>VIII. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>18,88 %</b>	<b>94,44</b>	<b>20%</b>	<b>56,88%</b>	<b>59,88%</b>
1	Pengalihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Pengalihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	10 sektor pajak	10 sektor pajak	9 sektor pajak	9 sektor pajak	100	9 sektor pajak	9 sektor pajak	90,00 %
2	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 WP	30 WP	30 WP	36 WP	120	28 WP	124 WP	25,83 %
3	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gebuangan yang di lakukan	16 kegiatan	14 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	14 kegiatan	32 kegiatan	50,00
4	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	16 kegiatan	14 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	14 kegiatan	32 kegiatan	50,00
5	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggalan Pajak di 7 UPT	48 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	36 kegiatan	75,00

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
6	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	19 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	19 dokumen	50 dokumen	65,78%
	<b>IX. Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>19,52 %</b>	<b>97,6</b>	<b>20%</b>	<b>59,52%</b>	<b>59,52%</b>
	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Pemberitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	19000 SKPD	15000 SKPD	16919 SKPD	112,79	9.639 SKPD	41558 SKPD	54,72%	
1										
2	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonalisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	378 desa	378 desa	100	378 desa	1134 desa	32,81%	
3	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	864 laporan	216 laporan	239 laporan	110,65	47 laporan	502 laporan	58,10%	
4	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Porforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	1293 wajib pajak	300 wajib pajak	483 wajib pajak	161	896 wajib pajak	1679 wajib pajak	32,46%	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluasan kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Persetujuan Daerah Tahun 20119	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-[7/6]	9	10-5+7+9	11-10/4
5	Intensifikasi dan Eksistensi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di lakukan intens dan ekstensi	118 OP	102 OP	18000 OP	17600 Op	97.78	122 op	17824 OP	94,40%
6	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	1293 WP	300 WP	1620 WP	1675 WP	103.4	1000 WP	2975 WP	57.52%
7	Penyusunan Perpajakan	Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang di hasilkan	12 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen	8 dokumen	67.00



Dari Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, diketahui bahwa perkiraan realisasi Capaian Target Renstra untuk semua Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang realisasi capaian program maupun tingkat capaian realisasi target Renstra Perangkat Daerah sudah terealisasi dengan sesuai dengan target, khususnya untuk Program dan Kegiatan baru yang dilaksanakan mulai tahun 2018, Pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga terjadi perubahan kegiatan serta nomenklatur program/kegiatan yang tidak bisa tercapai dengan maksimal. Setelah dilakukan penyesuaian program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang memiliki 9 Program yaitu 5 program rutin dan 4 program utama Badan Pendapatan, dengan total kegiatan 41 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tingkat pencapaian ralisasi target Renstra sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 59,20%;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 58,52%;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 60%;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 kegiatan dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 60,82%;
5. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB, terdiri dari 7 kegiatan dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 60%;

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 yaitu 58,88%.
7. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdiri dari 6 kegiatan, dengan capaian program dan kegiatan samapai dengan trimester 2 tahun 2020 yaitu sebesar 78,21%;
8. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD, terdiri dari 3 kegiatan, dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 dengan capaian sebesar 75% ;dan
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan, dengan rata rata tingkat realisasi program dan kegiatan sampai dengan trimester 2 Tahun 2020 dengan capaian sebesar 60%.

#### **Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah memiliki obyek pelayanan langsung terhadap masyarakat diantaranya dengan wajib pajak yaitu:

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak daerah, wajib retribusi dan menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain - lain pendapatan kepada UPT;
- d. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
- e. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak, Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) yang melebihi masa jatuh temponya;
- f. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan banding Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- g. Pelaksanaan pelayanan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);

- h. Pelaksanaan pelayanan pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- i. Pelaksanaan pelayanan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB - P2);
- j. Pelaksanaan pelayanan pembatalan ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- k. Pelaksanaan pelayanan pengisian dan penghitungan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. Pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- m. Pelaksanaan penelitian verifikasi lapangan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- n. Pelaksanaan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- o. Pelaksanaan pembetulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- p. Pelaksanaan pembayaran kembali kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- q. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- r. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah;
- s. Pelaksanaan laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyeterannya ke Kas Daerah;
- t. Koordinasi dan melayani permohonan keberatan dan banding;
- u. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah juga memiliki peran yang sama dengan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang PBB – P2 tentang pelayanan langsung terhadap Wajib Pajak, yaitu:

- a. Menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan dari Bank Persepsi dengan Berita Acara;
- b. Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutama dari Wajib Pajak;

- c. Menyerahkan Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk Wajib Pajak yang Pajak Bumi dan Bangunannya telah dibayar kepada Wajib Pajak;
- d. Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas Pemungut.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2017-2019 juga dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.2**. Pada tabel 2.2 juga disajikan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang**

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah</b>														
1	Persentase tingkat kemandirian Keuangan Daerah	-	-	-	-	13.50%	-	-	-	13.50%	-	-		
<b>Indikator Program - Program Badan Pendapatan Daerah</b>														
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		
4	Persentase Peningkatkan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		



NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	-	-	-	-	15 OB	-	-	7032 OB	15 OB	-	-		
6	Jumlah pegawai memenuhi penguasaan dinas ke dalam daerah	-	-	-	-	150 HOK	-	-	-	150 HOK	-	-		
7	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	50 jenis	-	-	-	50 jenis	-	-		
8	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	-	-	115 jenis	-	-	-	115 jenis	-	-		
9	Jumlah pegawai memenuhi penguasaan dinas ke luar daerah	-	-	-	-	105 HOK	-	-	-	105 HOK	-	-		
10	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	-	-	15 jenis	-	-	-	15 jenis	-	-		
11	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	-	-	-	-	30 jenis	-	-	-	30 jenis	-	-		

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	-	-	14 jenis	-	-	-	14 jenis	-	-		
13	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	-	-	64 unit	-	-	-	64 unit	-	-		
14	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	-	-	112 jenis	-	-	-	112 jenis	-	-		
15	Jumlah Meubelur yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	20 jenis	-	-		
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	-	-	20 jenis	-	-	-	20 jenis	-	-		
17	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 baru yang diadakan	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	1 unit	-	-		
18	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan	-	-	-	-	0 unit	-	-	-	0 unit	-	-		
19	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	-	-	80 jenis	-	-	-	80 jenis	-	-		
20	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga	-	-	-	-	340 stel	-	-	-	340 stel	-	-		



NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	Jumlah penyediaan paksa dinas	-	-	-	-	340 stell	-	-	-	340 stell	-	-		
22	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	10 orang	-	-	-	10 orang	-	-		
23	Jumlah Laporan Tahunan	-	-	-	-	110 buku	-	-	-	110 buku	-	-		
24	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	-	-	-	-	100 buku	-	-	-	100 buku	-	-		
25	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	-	-	-	-	12 buku	-	-	-	12 buku	-	-		
26	Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		
27	Pengajuan Permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB dan BUMD yang terverifikasi dan validasi	-	-	-	-	85%	-	-	-	85%	-	-		
28	Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD	-	-	-	-	12 buku	-	-	-	12 buku	-	-		
29	Presentase penerimaan PBB P2	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Peringkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyek/zi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
30	Jumlah penerbitan SPPT PBB P2 yang diterbitkan	-	-	-	-	1.376.319 OP	-	-	-	1.376.319 OP	-	-		
31	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	-	-	-	-	320 desa	-	-	-	320 desa	-	-		
32	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB	-	-	-	-	1 aplikasi sim PBB	-	-	-	1 aplikasi sim PBB	-	-		
33	Jumlah kegiatan Pekan Penuntan Pajak / jumlah sppt PBB P2 yang di distribusikan	-	-	-	-	1.376.319 Op	-	-	-	1.376.319 OP	-	-		
34	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data /Jumlah desa yang dilakukan pemeliharaan Basis Data	-	-	-	-	33 Desa	-	-	-	33 Desa	-	-		
35	Jumlah Penagihan Pajak Non PBB yang di tagih	-	-	-	-	10 sektor pajak	-	-	-	10 sektor pajak	-	-		
36	Jumlah penenangan keberatan dan pengurangan objek pajak	-	-	-	-	30 WP	-	-	-	30 WP	-	-		

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
39	Jumlah kegiatan Operasi Gabung yang dilakukan	-	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	-	-		
36	Jumlah pemerkasaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	-	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	-	-		
40	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	-	-	-	-	12 kegiatan	-	-	-	12 kegiatan	-	-		
41	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	-	-	-	-	19 dokumen	-	-	-	19 dokumen	-	-		
42	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendaftaran Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	-	-	-	-	18000 SKPD	-	-	-	18000 SKPD	-	-		
43	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	378 Desa	-	-	-	378 Desa	-	-		
44	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	-	-	-	-	215 laporan	-	-	-	215 laporan	-	-		
45	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelcaian Benda Benda Berharga	-	-	-	-	331 WP	-	-	-	331 WP	-	-		

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
46	jumlah obyek pajak yang di lakukan inter dan eksten	-	-	-	-	112 OP	-	-	-	112 OP	-	-		
47	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	-	-	-	-	331 WP	-	-	-	331 WP	-	-		
48	Jumlah RAPERDA dan PERSUP yang di hasilkan	-	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	-	-		

### 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Badan Pendapatan Daerah;
- c. Kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan UPTD Pendapatan.

Terdapat beberapa permasalahan teknis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugas sebagai berikut:

#### a. Bidang BPHTB dan BUMD

- a. Terdapat perbedaan pemahaman antara petugas pelayanan dan wajib pajak tentang pajak BPHTB, Kurangnya SDM dan sarana-prasarana sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan;
- b. SSPD-BPHTB dari Bank Jatim tidak sesuai dengan rekapitulasi yang ada di BAPENDA, pelaksanaan pembayaran di seluruh Cabang Bank Jatim dan lamanya proses pelaporan menyebabkan keterlambatan pelaporan ke BAPENDA;
- c. Terdapat kesenjangan/perbedaan antara nilai pajak yang diajukan oleh wajib pajak dengan realita di lapangan.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Memberikan penjelasan kepada wajib pajak, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan,
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan bank jatim dan membuat rancangan koneksi aplikasi/ host to host sehingga realisasi dapat dilihat secara real time;
- 3) Melakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan nilai kewajaran obyek di lapangan.

#### b. Bidang PBB

- 1) Keadaan Wajib Pajak PBB P2 yaitu jumlah Objek Pajak pada waktu pendaerahan PBB P2 tahun 2014 sebanyak 1.348.344 OP, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1.397.158 OP. Permasalahannya adalah masih ada 85 Desa yang belum mempunyai Basis Data (Sismiop).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi PBB-P2, meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, meningkatkan potensi Pendapatan Daerah sektor PBB, dengan mempertimbangkan keadaan objek dan subjek pajak terkini, perlunya dilaksanakan kegiatan Pendataan dan Penilaian yang dilaksanakan melalui:

- 1) Pembentukan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data melalui pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 atau pihak lain yang ditentukan oleh Bidang PBB – P2;
- 2) Pemeliharaan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 sesuai Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan atau berdasarkan laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data.
- 3) Pembentukan dan pemeliharaan basis data objek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *uptodate* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi atau pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir maka basis data yang terbentuk perlu dipelihara dengan baik;
- 4) Berkurangnya Piutang PBB Hasil Pelimpahan dari Pusat.  
Dengan dialihkannya PBB – P2 menjadi pajak daerah maka seluruh piutang PBB-P2 yang tercatat di Ditjen Pajak diserahkan pula kepada Pemerintah Daerah. Dalam penyerahan data piutang PBB-

P2 Ditjen Pajak mempunyai tanggung jawab untuk meyerahkan data dan saldo piutang yang seakurat mungkin. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *official assessment*. Pajak ditetapkan oleh fiskus melalui kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala. Saat pemungutan PBB-P2 masih dilakukan oleh Ditjen Pajak, dasar perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan keadaan objek terkini. Kesalahan lain yang ditemui adalah nama pemilik atau Wajib Pajak yang tercantum SPPT tidak sesuai dengan nama pemilik atau Wajib Pajak sebenarnya, objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ditemukan fisiknya, dan penerbitan SPPT ganda atas objek pajak yang sama dengan nama pemilik yang berbeda. Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, wajib pajak menjadi enggan.

c. Bidang PDRD

- 1) Pengelolaan pajak sudah terintegrasi secara online mulai dari pendaftaran, penetapan sampai dengan pelaporan namun masih perlu upaya sosialisasi kepada Wajib Pajak secara berkelanjutan;
- 2) Potensi pajak belum tergali maksimal, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut;
- 3) Kurang maksimalnya SDM yang ada di UPT dalam menggali potensi daerah;
- 4) Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak atau masyarakat mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat;
- 5) Luasnya kondisi geografis Kabupaten Malang sehingga data WP dan OP belum update dari desa-desa, mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak adalah sebagian tugas desa, nantinya desa akan menerima 10% dari penerimaan pajak;
- 6) Ada tuisi yang belum tertuang dalam tuisi Bidang PDRD yaitu penyusunan target Pendapatan daerah sector retribusi, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sehingga perumusan target tidak maksimal. Belum ada subbid yang khusus menangani IT;

- 7) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) belum tergali secara maksimal karena kewenangan bidang ESDM menjadi kewenangan Provinsi;
- 8) Pentingnya upaya mewujudkan *tax clearance* sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Memberikan penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif;
- 2) Memaksimalkan SDM UPT dalam menggali potensi pajak daerah dengan cara memberikan bimbingan teknis perpajakan sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah lebih meningkat lagi;
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi SIPANJI dalam sistem pengelolaan Pajak Daerah sehingga mempermudah pelayanan kepada WP serta pemanfaatan SIPANJI untuk pendataan potensi pajak;
- 4) Perlunya aplikasi yang dapat menunjang kemudahan penyampaian informasi Desa-desa untuk memberikan informasi Objek Pajak agar dilakukan pendataan
- 5) Perlunya peningkatan kerjasama dengan Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran yang lebih mendekati kepada masyarakat seperti Indomaret dan Alfamart
- 6) Bidang PDRD melakukan fungsi koordinasi untuk perumusan dan perencanaan target diluar Pajak Daerah
- 7) Membuat struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan dalam hal IT
- 8) Mewujudkan *tax clearance* salah satunya dengan membangun koneksi / *host to host* dengan OPD terkait misalnya DPMPTSP dan Satpol PP.

d. Bidang P3O

- 1) Luasnya wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah wajib pajak yang belum didukung jumlah aparatur pemungut pajak dan tidak adanya ASN Fungsional Juru Sita sebagai bagian dari Penindakan;
- 2) Banyaknya pergantian domisili wajib pajak serta kepemilikan tempat pengenaan pajak yang berada di luar Kabupaten Malang;
- 3) Terdapat obyek pajak yang masih belum dilegalitaskan melalui porforasi pajak;



- 4) Surat permohonan keringanan dari wajib pajak terlalu berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan;

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Meningkatkan kepatuhan pada Wajib Pajak dalam pelunasan pembayaran sehingga perolehan Pajak Daerah pada 9 (sembilan) Obyek Pajak akan meningkat;
- 2) Terlaksananya penanganan pajak secara intensif di lapangan dan upaya penambahan Wajib Pajak serta Obyek Pajak baru;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menentukan Nilai Wajar dalam penentuan besaran keringanan Pajak.

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemic virus corona berdampak terhadap pembatasan ruang gerak masyarakat, mengakibatkan melemahnya pendapatan masyarakat dan perlambatan kegiatan usaha yang berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan Pajak Daerah. Namun pada saat yang sama Pemerintah Daerah harus memberikan **relaksasi** dari sisi administrasi agar pemenuhan kewajiban wajib pajak tetap dapat dilakukan. Relaksasi yang diberikan pada tahun berjalan guna mendorong percepatan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan pajak perlu peran Pemerintah Kabupaten Malang memberikan Insentif berupa Pengurangan Pokok ketetapan PBB P2 sampai tanggal jatuh tempo 31 Agustus 2020 khususnya bagi masyarakat/ Wajib Pajak seluruhnya yang saat ini sedang mengalami kelambatan ekonomi akibat pandemic virus corona. Sedangkan pada tahun 2021 yang merupakan masa recovery, akan dilaksanakan keringanan pembayaran pokok PBB P2 sampai dengan bulan Desember dan meningkatkan intensifikasi untuk percepatan realisasi pajak daerah tahun 2021.

## **2.2. Reviu terhadap Rancangan RKPD**

Pada sub bab ini disajikan perbandingan antara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan analisis kebutuhan Tahun 2021, alasan dan catatan penting perbedaan seperti terlihat pada **tabel 2.3** dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Malang**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGO INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGO INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RANCANGAN AWAL RKPD				27.958.630.712,00	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				26.498.630.712,00	
4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.078.189.472,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Badan Penyelenggaraan Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8.152.378.417,88	
4.402.29.01.01	Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (bulan)	8300 buah	38.082.000,00	Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (bulan)	3000 buah	20.000.000,00	
4.402.29.01.02	Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Penyelidikan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	12 bulan	302.400.000,00	Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Penyelidikan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	12 bulan	278.081.650,00	
4.402.29.01.03	Penyelidikan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah barang cetakan yang diterbitkan (jenis)	10 jenis	257.020.000,00	Penyelidikan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah barang cetakan yang diterbitkan (jenis)	11 jenis	67.000.000,00	
4.402.29.01.04	Penyelidikan Makanan dan Minuman	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4750 HOK	123.000.000,00	Penyelidikan Makanan dan Minuman	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1340 HOK	27.970.000,00	
4.402.29.01.05	Penyelidikan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pejabat pengkaji administrasi keuangan (OB)	11080 OB	7.353.934.880,00	Penyelidikan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pejabat pengkaji administrasi keuangan (OB)	4248 OB	7.205.934.880,00	
4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke dalam daerah (HOK)	524 HOK	220.250.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke dalam daerah (HOK)	180 HOK	80.300.000,00	
4.402.29.01.07	Penyelidikan Bahan Logistik Kantor	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 jenis	63.000.000,00	Penyelidikan Bahan Logistik Kantor	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	5.112.000,00	

KODE	RANCANGAN AWAL RUPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KESUTUHAN DATA/PAGU INDIKATIF	
4.402.20.01.05	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.402.20.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	42 jenis	104.850.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	69 jenis	60.000.000,00	
4.402.20.01.05	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah pegawai peserta/ peserta dan koordinator ke luar daerah (HOK)	203 HOK	202.746.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah pegawai peserta/ peserta dan koordinator ke luar daerah (HOK)	16 HOK	41.000.000,00	
4.402.20.01.10	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Permesinan/ Undangan	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Bahan Bakar dan Perawatan Permesinan/ Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	126.720.000,00	Penyediaan Bahan Bakar dan Perawatan Permesinan/ Undangan	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Bahan Bakar dan Perawatan Permesinan/ Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	39.488.880,00	
4.402.20.01.11	Penyediaan Instalasi Listrik/ Permesinan Bangunan Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah peralatan kelompok alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	55 jenis	64.925.092,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Permesinan Bangunan Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	36 jenis	37.790.801,69	
4.402.20.02	<b>PROGRAM PERINGKATAN BAZARA DAN PRABAZARA APARATUR</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.197.186.700,00</b>	<b>PROGRAM PERINGKATAN BAZARA DAN PRABAZARA APARATUR</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>429.835.100,00</b>	
4.402.20.02.01	Perbaikan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	40 jenis	200.000.000,00	Perbaikan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 jenis	63.287.600,00	
4.402.20.02.02	Perbaikan Rutin/Berkala Kearsifan Danau/Operasional	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	200 unit	276.982.000,00	Perbaikan Rutin/Berkala Kearsifan Danau/Operasional	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	85 unit	226.983.000,00	
4.402.20.02.03	Perbaikan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Perawatan Gedung Komersial dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 jenis	189.150.000,00	Perbaikan Rutin/Berkala Perawatan Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Perawatan Gedung Komersial dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 jenis	39.608.800,00	
4.402.20.02.04	Perbaikan Rutin/Berkala Mebelisur	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Mebelisur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	92.352.000,00	Perbaikan Rutin/Berkala Mebelisur	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Mebelisur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 jenis	0,00	
4.402.20.02.05	Perbaikan Perawatan Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Perawatan Gedung Kantor yang dipelihara ( jenis)	10 jenis	1.505.701.350,00	Perbaikan Perawatan Gedung Kantor	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Perawatan Gedung Kantor yang dipelihara (jenis)	3 jenis	25.000.000,00	

KODE	RAKARGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.402.29.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	BAGAN PONDAPATA M DAERAH	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 unit	0,00	
4.402.29.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gantung Kantor	BAGAN PONDAPATA M DAERAH	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0	0,00		Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0	0,00	
4.402.29.03.01	Pengadaan Peralengkapan Gantung Kantor	BAGAN PONDAPATA M DAERAH	Jumlah Peralengkapan Gantung Kantor yang diadakan (Jenis)	10 jenis	3.070.550,00	Pengadaan Peralengkapan Gantung Kantor	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah Peralengkapan Gantung Kantor yang diadakan (Jenis)	4 jenis	75.000.000,00	
4.402.29.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Pemasangan Kerja Aparatur (%)	100%	128.181.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Pemasangan Kerja Aparatur (%)	100%	0,00	
4.402.29.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersebut	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/ Bulu (Set)	0 set	0,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersebut	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/ Bulu (Set)	0 set	0,00	
4.402.29.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	BAGAN PONDAPATA M DAERAH	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Set)	360 set	125.181.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Set)	0 set	0,00	
4.402.29.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER APARATUR		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63.384.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	26.000.000,00	
4.402.29.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan (orang)	190 orang	63.384.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan (orang)	55 orang	25.000.000,00	
4.402.29.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN NEGANGAN		Persentase Dokumen Rencana, Laporan Kemajuan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.325.300,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN NEGANGAN		Persentase Dokumen Rencana, Laporan Kemajuan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2.376.000,00	
4.402.29.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Resultasi Kinerja SKPD	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	12 buku	8.773.600,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Resultasi Kinerja SKPD	Badan Penyelenggara Daerah	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	12 buku	2.376.000,00	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DATA/PAGU INDIKATIF		
1												
4.402.29.05.0 3	Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kecamatan I (Stukel)	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan kecamatan I dan kecamatan II (Stukel)	12 buku	3.025.400,00	Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan		Jumlah dokumen laporan keuangan kecamatan I dan kecamatan II (Stukel)	0 buku	0,00		12
4.402.29.06.0 3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Stukel)	6 buku	3.526.100,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Stukel)	0 buku	0,00		
4.402.29.06 PROGRAM PELAYANAN PERSEKUTUAN PAJAK BPHTB DAN BUMD			Presentase Tingkat pelayanan penyelesaian BPHTB	100%	3.753.536.560,00	PROGRAM PELAYANAN PERSEKUTUAN PAJAK BPHTB DAN BUMD		Presentase Tingkat pelayanan penyelesaian BPHTB	100%	1.804.451.104,17		
4.402.29.06.0 1	Pelayanan dan Pendidikan BPHTB	Badan Penyelidikan Daerah	Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk penyelesaian BPHTB yang terlayani dan di tebi	100%	1.015.444.300,00	Pelayanan dan Pendidikan BPHTB		Presentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk penyelesaian BPHTB yang terlayani dan di tebi	100%	605.468.000,00		
4.402.29.06.0 2	Verifikasi dan Validasi	Badan Penyelidikan Daerah	Presentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk penyelesaian BPHTB yang terlayani dan validasi	100%	1.192.518.000,00	Verifikasi dan Validasi		Presentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk penyelesaian BPHTB yang terlayani dan validasi	100%	804.181.000,00		
4.402.29.06.0 3	Peninjauan BPHTB dan BUMD	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah laporan peninjauan BPHTB dan BUMD	12 buku	544.574.360,00	Peninjauan BPHTB dan BUMD		Jumlah laporan peninjauan BPHTB dan BUMD	60 buku	324.801.204,17		
4.402.29.07 PROGRAM PELAYANAN DAN PERINGKATAN PERSEKUTUAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN			Tingkat Layanan PBB	100%	6.189.286.346,00	PROGRAM PELAYANAN DAN PERINGKATAN PERSEKUTUAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN		Tingkat Layanan PBB	100%	4.506.389.110,70		
4.402.29.07.0 1	Optimalisasi Sistem PBB P2	Badan Penyelidikan Daerah	Presentase Penertarikan PBB P2	100%	2.624.346.300,00	Optimalisasi Sistem PBB P2	Badan Penyelidikan Daerah	Presentase Penertarikan PBB P2	100%	1.102.082.880,00		
4.402.29.07.0 2	Penertarikan Muncul dan Individual SPP PBB P2	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Penertarikan SPP PBB P2	100/211 up	1.344.627.400,00	Penertarikan Muncul dan Individual SPP PBB P2	Badan Penyelidikan Daerah	Jumlah Penertarikan SPP PBB P2	100/201 up	879.130.788,70		

KODE	RAKORANG AWAL RUPF					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KERUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	4.402.29.07.0 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan PBB P2	3	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran PBB P2 dalam 1 tahun	300 Desa	673.804.000,00	Badan Pendapatan Daerah	8	590 Desa	11	1.092.432.545,00	12
4	4.402.29.07.0 4	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	4	Jumlah Pemeliharaan dan Perangcanaan Sistem PBB P2	100.450.000,00	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	9	1 aplikasi SIM PBB	82.000.000,00		
5	4.402.29.07.0 5	Pekan Pantauan Dan Penyalabsuasan SPT PBB P2	5	Jumlah Kegiatan Pekan Pantauan - Jumlah SPT PBB P2 yang diterbitkan	423.036.000,00	Pekan Pantauan Dan Penyalabsuasan SPT PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	10	1397881 op	438.677.400,00		
6	4.402.29.07.0 6	Penyusunan Dan Penyalabsuasan Basis Data PBB P2	6	Jumlah Desa yang dilakukan penyalabsuasan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan penyalabsuasan Basis data	793.472.346,00	Penyusunan Dan Penyalabsuasan Basis Data PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	4 desa		921.162.897,00		
1	4.402.29.08.0 1	Penghasilan Pagar Pajak Daerah Non PBB	100%	Tingkat Pengerasan Pengerasan Daerah	3.438.911.576,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGINGKATAN PENERIMAAN DAERAH		100%		3.215.411.577,95		
2	4.402.29.08.0 2	Penerimaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	9	Jumlah penerimaan aparatur pajak di 7 UPT dan konsultasi di provinsi dan pusat	0,00	Penerimaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	9 sektor pajak	0 penyalabsuasan	0,00		
3	4.402.29.08.0 3	Penerimaan Kebersihan dan Pengamanan	30 WP	Jumlah penyalabsuasan kebersihan dan pengamanan objek pajak	354.187.540,00	Penerimaan Kebersihan dan Pengamanan	Badan Pendapatan Daerah	30 WP		305.416.277,00		

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DARA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.402.25.05.04	Operasi Gabungan Penyelenggaraan Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Kegiatan Operasi Gabungan yang di laksanakan	4 kegiatan	357.490.214,00	Operasi Gabungan Penyelenggaraan Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di laksanakan	14 kegiatan	217.312.000,00	
4.402.25.05.05	Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	4 kegiatan	496.736.500,00	Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	14 kegiatan	501.066.030,00	
4.402.25.05.06	Rekomendasi Putug Pajak	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi Putug dan Tanggapan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	813.002.984,00	Rekomendasi Putug Pajak	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi Putug dan Tanggapan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	449.903.360,95	
4.402.25.05.07	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atau pertanggung jawaban pajak daerah	12 dokumen	657.955.440,00	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atau pertanggung jawaban pajak daerah	19 dokumen	489.325.920,00	
4.402.25.09	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PERSEKUTUAN PAJAK NON PBB DAN BPHTS		Tingkat Pemenuhan Pajak Non PBB dan BPHTS	100%	4.129.489.756,00	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PERSEKUTUAN PAJAK NON PBB DAN BPHTS		Tingkat Pemenuhan Pajak Non PBB dan BPHTS	100%	3.021.385.401,29	
4.402.25.05.01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Pengiriman Permohonan Perubahan dan Pendaftaran Surat Keterangan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15000 SKPD	970.786.388,42	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Pengiriman Permohonan Perubahan dan Pendaftaran Surat Keterangan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	9359 SKPD	767.032.000,00	
4.402.25.05.03	Perencanaan Dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 Desa	268.051.509,01	Perencanaan Dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	244.049.000,00	
4.402.25.05.03	Perencanaan Target dan Laporan Perpajakan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi yang di submit	216 laporan	408.225.504,07	Perencanaan Target dan Laporan Perpajakan	Badan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi yang di submit	216 laporan	334.708.000,00	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PADU INDIKATIF		
1												
4.402.29.09.0	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.402.29.09.0	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.402.29.09.0	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.402.29.09.0	6	6	6	7	8	9	10	11	12			
4.402.29.09.0	7	7	7	8	9	10	11	12	13			



Dari Tabel 2.3 di atas dapat kita ketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sama dengan program dan kegiatan tahun 2020. Artinya adalah ada kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020. Target yang telah ditetapkan di awal Renstra *breakdown* menjadi target setiap tahun serta selalu dievaluasi capaiannya.

### **2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang belum ada usulan (NIHIL) program atau kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang bersifat fisik hal ini dapat di lihat dalam tabel Usulan Program dan Kegiatan seperti yang tertera pada **tabel 2.4** dibawah ini:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mengacu kepada kebijakan nasional bagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Namun permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah potensi dan wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi pajak daerah secara optimal dan percepatan dalam pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah. Perlu upaya terus menerus intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi teknologi informasi yang ada serta adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pajak daerah.

Disamping itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai, belum optimalnya dan terbatasnya personil dalam penggalian sumber sumber pendapatan baru dan pemungut potensi sumber sumber pendapatan dikarenakan kurang sarana kerja dan luasnya wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pembinaan aparatur pemungut pajak melalui bimtek

Arah kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, diarahkan kepada:
  - Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan

anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

- Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun infrastruktur teknologi dan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan *on line* dengan pihak perbankan
- Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi. **Tujuan** Badan Pendapatan Daerah sesuai Perubahan Renstra tahun 2016-2021 adalah "Meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD:.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. **Sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan misi, adalah "Peningkatan pendapatan asli daerah guna kemandirian daerah".

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 9 program dan 44 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERAIRAN MAJU TAHUN 2022		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
4.402.29	BADAN PENDAPATAN DAERAH				20.456.630.712,00				31.156.407.382,00	
4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkuantoran (%)		100%	8.152.578.417,88			100%	10.761.494.890,00	
4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Siant Masyarakat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Bulan Penetapan Daerah	3000 buah	20.000.000,00	APBD Kabupaten		8000 buah	45.000.000,00	
4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Bulan Penetapan Daerah	12 bulan	378.081.650,00	APBD Kabupaten		12 bulan	302.400.000,00	
4.402.29.01.03	Penyediaan Binang Cessano dan Penggantian	Jumlah barang cesano yang disediakan (jenis)	Bulan Penetapan Daerah	11 jenis	67.000.000,00	APBD Kabupaten		10 jenis	359.000.000,00	
4.402.29.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman beserta goreng, sayur, dan buah yang disediakan (HOK)	Bulan Penetapan Daerah	1.248 HOK	27.070.000,00	APBD Kabupaten		4750 HOK	125.750.000,00	
4.402.29.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	Bulan Penetapan Daerah	4.248 OP	7.505.034.880,00	APBD Kabupaten		11080 OP	9.119.934.880,00	
4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Badan Daerah	Jumlah pegawai menerima pengoperasian dinas ke dinas daerah (HOK)	Bulan Penetapan Daerah	180 HOK	80.300.000,00	APBD Kabupaten		544 HOK	330.300.000,00	

KODE	URSAH PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAHARAN MALJU TAHUN 2022		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PASU INDIKATIF	REMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PASU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.402.29.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	5 jenis	5.112.000,00	APBD Kabupaten		11 jenis	60.000.000,00	
4.402.29.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	60 jenis	80.000.200,00	APBD Kabupaten		42 jenis	198.850.000,00	
4.402.29.01.09	Papir-Rapat, koran, dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah pegawai menerima pengumuman dinas ke luar daerah (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	15 HOK	41.000.000,00	APBD Kabupaten		210 HOK	210.500.000,00	
4.402.29.01.10	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	2 jenis	39.488.886,00	APBD Kabupaten		2 jenis	125.500.000,00	
4.402.29.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	50 jenis	27.790.801,48	APBD Kabupaten		30 jenis	85.000.000,00	
4.402.29.02	PROGRAM PENGHATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pencapaian Sarana dan Proseses Pemasangan Aparatur (%)		100%	429.839.100,00			100%	3.027.379.600,00	
4.402.29.02.01	Pembelajaran Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipeliharai Rutin/Berkala ( jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	3 jenis	63.247.600,00	APBD Kabupaten		40 jenis	320.000.000,00	
4.402.29.02.02	Pembelajaran Rutin/Berkala Kelembagaan/Operasional	Jumlah kelembagaan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipeliharai rutin dan berkala (Juli)	Bulan Pelaksanaan Daerah	85 unit	225.983.000,00	APBD Kabupaten		295 unit	332.379.600,00	
4.402.29.02.03	Pembelajaran Rutin/Berkala Pradaban Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipeliharai Rutin/Berkala (jenis)	Bulan Pelaksanaan Daerah	16 jenis	39.668.500,00	APBD Kabupaten		25 jenis	195.000.000,00	

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021					CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2022		KEBERANGAN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAMA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DAMA/PAGU INDIKATIF			
										4		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4.402.29.02.00	Program Perantara Gedung Kantor	Jumlah Perbaikan Gedung Kantor yang dilakukan (jumlah)	Badan Penyelenggara Daerah	3 jenis	25.000.000,00	APBD Kabupaten		10 jenis	1.750.000.000,00			
4.402.29.02.07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dilakukan (jumlah)	Badan Penyelenggara Daerah	4 jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten		10 jenis	400.000.000,00			
4.402.29.04	PROGRAM PEMERIKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	25.000.000,00			100%	63.584.000,00			
4.402.29.04.01	Pembinaan dan Pelatihan Pemasok	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Badan Penyelenggara Daerah	35 orang	25.000.000,00	APBD Kabupaten		350 orang	63.584.000,00	Pengantar Umbaran Gender		
4.402.29.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMPOKAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Delapan Persentase, Laporan Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	3.376.000,00			100%	8.773.800,00			
4.402.29.05.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Badan Penyelenggara Daerah	12 buku	2.376.000,00	APBD Kabupaten		12 buku	8.773.800,00			
4.402.29.06	PROGRAM PELAYANAN PEMERINTAH PAJAK BPPTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPPTB		100%	1.804.451.104,17			100%	2.900.163.388,00			
4.402.29.06.01	Pelayanan dan Penjualan BPPTB	Persentase persentase pemrosesan Wajib Pajak untuk penyelesaian BPPTB yang terlayani dan di lebih	Badan Penyelenggara Daerah	100%	505.468.000,00	APBD Kabupaten		100%	1.066.316.410,00			

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAHARAAN MAJU TAHUN 2022		KETERANGAN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESYUJUKAN DATA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DATA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESYUJUKAN DATA/PAGU INDIKATIF		
											4
1		3									
4.402.29.06.02	Verifikasi dan Validasi	Percobaan jumlah pengajuan permohonan yang layak untuk pembayaran BPHTB yang terdistribusi dan validasi	Badan Penyelenggaraan Daerah	100%	884.181.000,00	APBD Kabupaten	100%	1.252.143.900,00			
4.402.29.06.03	Penalukan BPHTB dan BUNGD	Jumlah laporan pembetulan BPHTB dan BUMD	Badan Penyelenggaraan Daerah	60 buku	924.801.204,17	APBD Kabupaten	60 buku	571.803.076,00			
4.402.29.07	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBERANTARAN PERSERIKATAAN PERSEKUTUAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>Tingkat Layanan PBS</b>		<b>100%</b>	<b>4.506.389.110,70</b>		<b>100%</b>	<b>9.467.200.663,20</b>			
4.402.29.07.01	Optimalisasi Pemerintahan PBB P2	Persentase Pemerintahan PBB P2	Badan Penyelenggaraan Daerah	100%	1.102.983.480,00	APBD Kabupaten	100%	2.755.600.615,00			
4.402.29.07.02	Penerbitan Nosal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	Badan Penyelenggaraan Daerah	1207381 op	879.132.758,70	APBD Kabupaten	1.394211 op	1.306.808.770,00			
4.402.29.07.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Pemerintahan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan pemerintahan PBB P2 Jumlah laporan pemerintahan tanggapan PBB P2 dalam 1 tahun	Badan Penyelenggaraan Daerah	300 Desa	1.092.433.545,00	APBD Kabupaten	380 Desa	1.022.494.200,00			
4.402.29.07.04	Pengalokasian Dana Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Penyalangan dan Pengalokasian Sektor PBB P2	Badan Penyelenggaraan Daerah	1 op/Desa SIM PBB	82.000.000,00	APBD Kabupaten	1 op/Desa SIM PBB	106.514.500,00			
4.402.29.07.05	Pelaku Penerbitan Dan Penyalangan Sektor SPPT PBB P2	Jumlah Kegiatan Penerbitan dan Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	Badan Penyelenggaraan Daerah	1207381 op	428.677.400,00	APBD Kabupaten	1394211 op	443.652.615,00			



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR NINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KEJARAN TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MELJU TAHUN 2022		KETERANGAN
			LOHASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAIDU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAIDU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.402.29.07.06	Penyusunan Data Pencatatan Badan Data PBB P2	Jumlah Desa yang dilakukan pencatatan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan basis data	Badan Penyelenggara Daerah	4 desa	921.102.897,00	APBD Kabupaten		5 desa	833.134.963,30	
4.402.29.08	PROGRAM PERAWASAN DAN PEMBERUKTAN PENYERIKMAAN DAERAH	Tingkat Penguasaan Penerimaan Daerah		100%	3.816.411.877,96			100%	3.610.857.186,90	
4.402.29.08.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	Badan Penyelenggara Daerah	9 sektor pajak	763.686.000,00	APBD Kabupaten		9 sektor pajak	1.217.568.382,00	
4.402.29.08.03	Peningkatan Kebersihan dan Perumahan	Jumlah pemukiman kesehatan dan pengurangan objek pajak	Badan Penyelenggara Daerah	28 WP	205.415.277,00	APBD Kabupaten		30 WP	371.896.917,00	
4.402.29.08.04	Operasi dan Pemeliharaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Pajak Daerah	Badan Penyelenggara Daerah	14 kegiatan	217.312.090,00	APBD Kabupaten		14 kegiatan	375.312.234,70	
4.402.29.08.05	Penyediaan Pajak Daerah	Jumlah pemeliharaan Pajak Daerah for Wajib Pajak	Badan Penyelenggara Daerah	14 kegiatan	291.065.030,00	APBD Kabupaten		14 kegiatan	521.573.325,00	
4.402.29.08.06	Rehabilitasi Pening Pajak	Jumlah kegiatan rehabilitasi Pening Pajak dan Tunggakan Pajak di 7 U/PT	Badan Penyelenggara Daerah	12 kegiatan	449.903.360,95	APBD Kabupaten		12 kegiatan	538.633.133,00	
4.402.29.08.07	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring/evaluasi pajak daerah	Badan Penyelenggara Daerah	19 dokumen	449.226.920,00	APBD Kabupaten		19 dokumen	585.633.312,00	
4.402.29.09	PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBERUKTAN PENYERIKMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB		100%	3.021.885.401,29			100%	4.335.954.243,80	

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		HETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
				4	5			6	7	
1										
4.402.20.09.01	Penyusunan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghimpunan Penerimaan Perbaikan dan Pendaftaran Sumat Kesatuan Pajak (SKP/SKPD) serta Pendaftaran Seseorang Ap/Biaya Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	9339 SKPD	767.032.000,00	APBD Kabupaten		15000 SKPD	3.1019.925.602,64	
4.402.20.09.02	Penyusunan Data Penghimpunan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Kecamatan berpeda Besa	Jumlah desa yang mendapatkan lagi hasil Pajak dan Restribusi	Badan Pendapatan Daerah	378 desa	344.089.000,00	APBD Kabupaten		578 desa	312.054.064,46	
4.402.20.09.03	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di submit	Badan Pendapatan Daerah	316 laporan	334.708.000,00	APBD Kabupaten		316 laporan	401.627.178,28	
4.402.20.09.04	Penyusunan dan Pengadministrasian Permintaan Perbaikan Objek - Objek Berharga	Jumlah permintaan Perbaikan dan Pengadministrasian permohonan Berda Berda Berharga	Badan Pendapatan Daerah	300 wajib pajak	338.598.116,39	APBD Kabupaten		300 wajib pajak	368.995.810,03	
4.402.20.09.05	Identifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek pajak yang di lokasikan baru dan eksten	Badan Pendapatan Daerah	122 DP	391.218.385,00	APBD Kabupaten		18000 DP	624.981.179,10	
4.402.20.09.06	Pengaruhin Perolehan dan Penurunan Data Objek Pajak	Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendapatan objek pajak	Badan Pendapatan Daerah	1630 WP	865.858.000,00	APBD Kabupaten		1630 WP	1.046.166.075,61	
4.402.20.09.07	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah peraturan dan perintah yang di buat/dit	Badan Pendapatan Daerah	5 dokumen	281.122.000,00	APBD Kabupaten		3 dokumen	552.903.913,50	

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan:
  - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
  - c) Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan;
  - d) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
  - f) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  - g) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
  - h) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - i) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
  - j) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - k) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang – undangan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan :
  - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  - b) Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
  - c) Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan gedung kantor
  - d) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
  - e) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :
  - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan :
  - a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD terdiri dari 3 kegiatan :
  - a) Kegiatan Pelayanan dan penelitian BPHTB
  - b) Kegiatan Pembukuan BPHTB dan BUMD
  - c) Kegiatan Verifikasi dan Validasi

- 6) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari 6 kegiatan :
  - a) Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB - P2
  - b) Kegiatan Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2
  - c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2
  - d) Kegiatan Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2
  - e) Kegiatan Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2
  - f) Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2
- 7) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah terdiri dari 6 kegiatan:
  - a) Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB
  - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
  - c) Kegiatan Penanganan Keberatan dan Pengurangan
  - d) Kegiatan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah
  - e) Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
  - f) Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak
- 8) Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB terdiri dari 7 kegiatan :
  - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan
  - b) Kegiatan Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa
  - c) Kegiatan Penyusunan target dan laporan perpajakan
  - d) Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga
  - e) Kegiatan Intensifikasi & Ekstenfikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah
  - f) Kegiatan Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak
  - g) Kegiatan Penyusunan Regulasi Perpajakan

Pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah ada 1 program rutin dan 3 kegiatan rutin yang di tiadakan yaitu program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Hal ini dikarenakan karena adanya rasionalisasi pada Badan Pendapatan Daerah sehingga anggaran yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan yang lebih mendukung pada pelayanan pajak.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan Nasional, Provinsi, Kota atau Kabupaten pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah termasuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 termuat dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (GPA terlampir).

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat kewenangan urusan penunjang keuangan. Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2021. Program dan Kegiatan tahun 2021 sesuai Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2021 dan pendanaan indikatif tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Rencana Kerja Pendanaan Tahun 2021

No.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				SUMBER DANA	KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				20.458.630.712,00			
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		100%	8.152.578.417,88			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Badan Pendapatan Daerah	8500 buah	20.000.000,00	APBD Kabupaten		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Badan Pendapatan Daerah	12 bulan	278.081.650,00	APBD Kabupaten		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Badan Pendapatan Daerah	57 jenis	67.000.000,00	APBD Kabupaten		
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Badan Pendapatan Daerah	12585 HOK	27.970.000,00	APBD Kabupaten		
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Badan Pendapatan Daerah	7032 OB	7.505.934.880,00	APBD Kabupaten		
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Badan Pendapatan Daerah	758 HOK	80.200.000,00	APBD Kabupaten		
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	11 jenis	5.112.000,00	APBD Kabupaten		
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	75 jenis	60.000.200,00	APBD Kabupaten		
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Badan Pendapatan Daerah	568 HOK	41.000.000,00	APBD Kabupaten		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Badan Pendapatn Daerah	2 jenis	39.488.886,00	APBD Kabupaten	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Badan Pendapatn Daerah	40 jenis	27.790.801,88	APBD Kabupaten	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>429.839.100,00</b>		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Badan Pendapatn Daerah	4 jenis	63.247.600,00	APBD Kabupaten	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Badan Pendapatn Daerah	309 unit	226.983.000,00	APBD Kabupaten	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Badan Pendapatn Daerah	7 jenis	39.608.500,00	APBD Kabupaten	
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Badan Pendapatn Daerah	7 jenis	25.000.000,00	APBD Kabupaten	
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	BADAN PENDAPATAN N DAERAH	6 jenis	75.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000,00</b>		
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Badan Pendapatn Daerah	100 orang	25.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.376.000,00</b>		
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Badan Pendapatn Daerah	48 buku	2.376.000,00	APBD Kabupaten	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUND</b>	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>		<b>100%</b>	<b>1.804.451.104,17</b>		
20	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teati	Badan Pendapatn Daerah	100%	595.468.900,00	APBD Kabupaten	



RENCANA TAHUN 2021							
No.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terfervikasi dan validasi	Badan Pendapatan Daerah	100%	884.181.000,00	APBD Kabupaten	
22	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	Badan Pendapatan Daerah	27 buku	324.801.204,17	APBD Kabupaten	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>		<b>100%</b>	<b>4.506.389.110,70</b>		
23	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	100%	1.102.982.480,00	APBD Kabupaten	
24	Pencetakan Masael dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	1392226 op	879.132.788,70	APBD Kabupaten	
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	Badan Pendapatan Daerah	390 Desa	1.092.433.545,00	APBD Kabupaten	
26	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	1 aplikasi SIM PBB	82.000.000,00	APBD Kabupaten	
27	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	Badan Pendapatan Daerah	1519390 op	428.677.400,00	APBD Kabupaten	
28	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	Badan Pendapatan Daerah	33 desa	921.162.897,00	APBD Kabupaten	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.516.411.577,95</b>		
29	Pengایش Plutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	Badan Pendapatan Daerah	10 sektor pajak	763.386.500,00	APBD Kabupaten	
30	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	Badan Pendapatan Daerah	28 W/P	205.416.277,00	APBD Kabupaten	
31	Operasi Gabungan Penerbitan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang dilakukan	Badan Pendapatan Daerah	14 kegiatan	217.312.090,00	APBD Kabupaten	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	Badan Pendapatan Daerah	14 kegiatan	391.066.030,00	APBD Kabupaten	
33	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	Badan Pendapatan Daerah	12 kegiatan	449.903.360,95	APBD Kabupaten	
34	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	19 dokumen	489.326.920,00	APBD Kabupaten	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>		<b>100%</b>	<b>3.021.555.401,29</b>		
35	Penyelesaian Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Pemberitahuan dan Pendistribusian Surat Keterangan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	15800 SKPD	767.032.000,00	APBD Kabupaten	
36	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah	378 desa	244.049.000,00	APBD Kabupaten	
37	Penyusunan, Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	Badan Pendapatan Daerah	216 laporan	334.708.000,00	APBD Kabupaten	
38	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Perforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengeluaran Benda Berharga	Badan Pendapatan Daerah	336 wajib pajak	238.598.116,29	APBD Kabupaten	
39	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan ekstensi	Badan Pendapatan Daerah	122 OP	291.218.285,00	APBD Kabupaten	
40	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	Badan Pendapatan Daerah	300 WP	865.858.000,00	APBD Kabupaten	
41	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah raperda dan perbub yang di hasilkan	Badan Pendapatan Daerah	5 dokumen	280.122.000,00	APBD Kabupaten	

Tabel 4.2

## Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan

## Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV						
					Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			27.958.630.712,00													
				27.958.630.712,00													
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM Pelayanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	27.958.630.712,00	12,10	14,15	23,81	24,51	38,15	33,30	25,94	28,05					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	9.078.159.472,00	10,00	17,70	26,88	29,50	33,75	31,30	29,37	21,50					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	58.685.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	10 jenis	302.400.000,00	22,97	0,90	25,41	78,00	24,49	18,90	27,13	2,20					

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV							
					4	5 ( RP )	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4750 HOK	357.050.000,00	25,00	17,40	25,00	36,60	25,00	25,00	24,00	25,00	25,00	22,00				14
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11080 OB	123.600.000,00	30,12	15,27	2,41	20,79	28,92	28,92	34,56	38,55	29,38					
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	524 HOK	7.355.934.880,00	22,39	10,00	32,84	27,00	44,77	44,77	35,00	0,00	28,00					
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 jenis	220.250.000,00	25,00	9,00	25,00	7,50	25,00	25,00	60,00	25,00	17,50					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 jenis	63.000.000,00	33,00	0,00	35,00	39,00	10,00	10,00	35,30	22,00	25,70					
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	203 HOK	198.850.000,00	11,35	10,00	10,45	27,00	38,92	38,92	35,00	39,28	28,00					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	202.746.000,00	10,00	1,80	25,00	47,40	30,00	30,00	1,80	35,00	49,00					

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV							
					4	5 (RP)	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	25 jenis	126.720.000,00	14,30	0,00	8,61	32,50	46,08	39,80	31,01	27,70						14
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)	100%	68.923.592,00	6,30	0,00	35,10	50,13	43,28	33,29	15,32	16,58						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40 jenis Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	40 jenis	2.197.156.700,00	10,00	0,00	30,00	45,25	27,00	45,25	33,00	9,50						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250 unit Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	250 unit	200.000.000,00	15,00	0,00	40,00	35,54	40,00	26,14	5,00	38,32						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	25 jenis Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 jenis	276.983.000,00	15,00	0,00	25,00	33,33	40,00	33,33	20,00	33,34						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelur	7 jenis Jumlah Mebelur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	189.150.000,00	15,00	0,00	30,00	100,00	30,00	0,00	25,00	0,00						
	Pengadaan Peralatan Kantor	10 jenis Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	10 jenis	22.252.000,00	0,00	0,00	40,00	54,73	40,00	33,57	20,00	11,70						

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV						
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan/jenis	10 jenis	1.505.701.150,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	14
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peanjung Kerja Aparatur (%)	100%	3.070.550,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	60,00	100,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	360 stel	125.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	125.181.000,00	0,00	12,00	20,00	27,50	0,00	60,00	35,00	0,00	20,00	25,50	0,00	25,50	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	190 orang	63.584.000,00	0,00	12,00	0,00	27,50	0,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	63.584.000,00	7,88	7,17	20,90	25,25	0,00	35,27	27,41	0,00	35,95	40,17	0,00	0,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	12 buku	14.325.300,00	25,00	11,70	25,00	27,60	0,00	25,00	35,30	0,00	25,00	25,40	0,00	0,00	

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)			
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			12 buku	8.773.800,00	0,00	0,00	45,00	59,02	40,00	40,98	15,00	0,00					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 buku	2.025.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	60,00	100,00					
6	PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	100%	3.526.100,00	10,67	10,67	24,50	24,50	37,90	37,90	26,93	26,93					
	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	Persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti	100%	2.752.536.560,00	25,00	10,67	25,00	24,50	25,00	37,90	25,00	26,93					
	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	100%	1.015.444.200,00	25,00	10,67	25,00	24,50	25,00	37,90	25,00	26,93					
	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	12 buku	1.192.518.000,00	25,00	10,67	25,00	24,50	25,00	37,90	25,00	26,93					

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV		KET				
					Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	100%	544.574.360,00	10,30	5,53	34,52	36,38	24,76	27,71	30,42	30,38					
	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	100%	6.159.286.346,00	6,50	3,55	13,50	60,23	60,00	8,00	20,00	28,22					
	Pencetakan Masalah dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penyerbitan SPPT PBB P2	1394211 op	2.624.386.300,00	70,00	3,26	20,00	12,40	5,00	54,92	5,00	29,42					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2	390 Desa	1.244.627.400,00	10,00	12,01	30,00	12,40	40,00	30,60	20,00	44,99					
	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	1 aplikasi SIM PBB	973.804.000,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	100,00	30,00	0,00					



No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV						
					Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	1394211 op	100.490.000,00	25,00	7,38	25,00	31,68	25,00	34,11	25,00	26,83					
	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	4 desa	422.526.300,00	25,00	7,38	25,00	31,68	25,00	34,11	25,00	26,83					
8	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	793.452.346,00	10,39	10,39	25,85	25,85	34,30	34,30	29,46	29,46					
	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	9 sektor pajak	3.438.911.578,00	25,00	10,39	25,00	25,85	25,00	34,30	25,00	20,46					
	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	30 WP	1.159.588.900,00	25,00	10,39	25,00	25,85	25,00	34,30	25,00	20,46					
	Operasi Gabungan Penerbitan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	4 kegiatan	354.187.540,00	25,00	10,39	25,00	25,85	25,00	34,30	25,00	29,46					
	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	4 kegiatan	357.440.214,00	25,00	10,39	25,00	25,85	25,00	34,30	25,00	29,46					

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV						
					Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunjukkan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	456.736.500,00	15,00	10,39	35,00	25,85	30,00	34,30	20,00	29,46					
	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi etas penerimaan pajak daerah	12 dokumen	513.002.984,00	15,00	10,39	35,00	25,85	30,00	34,30	20,00	29,46					
9	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%	557.955.440,00	10,25	10,25	26,84	26,84	40,04	40,04	22,87	22,87					
	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15000 SKPD	4.129.489.756,00	20,00	10,25	25,00	20,84	30,00	40,04	25,00	22,87					
	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	970.786.288,42	10,00	10,25	30,00	26,84	40,00	40,04	20,00	22,87					

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)												KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF RP	TW I		TW II		TW III		TW IV						
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Penyusunan Target dan Laporan Perpejakan	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	216 laporan	298.031.509,01	25,00	10,25	25,00	26,84	25,00	26,84	25,00	25,00	40,04	25,00	25,00	22,87	
	Pelayanan dan Pengadministrasian Permisian Perforansi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Perforansi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Berharga	300 wajib pajak	468.225.884,07	25,00	10,25	25,00	26,84	25,00	26,84	25,00	25,00	40,04	25,00	25,00	22,87	
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten	18000 OP	293.901.723,82	25,00	10,25	25,00	26,84	25,00	26,84	25,00	25,00	40,04	25,00	25,00	22,87	
	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	1620 WP	595.220.170,58	25,00	10,25	25,00	26,84	25,00	26,84	25,00	25,00	40,04	25,00	25,00	22,87	
	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah peraturan perub yang dihasilkan	2 dokumen	996.348.643,44	25,00	10,25	25,00	26,84	25,00	26,84	25,00	25,00	40,04	25,00	25,00	22,87	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik tahun 2021, serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan atau pekerjaan tersebut akan dianggarkan kembali tahun 2022.

Implementasi Rencana Kerja sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.



**BERITA ACARA**  
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021  
Nomor : 050/4407/35.07.202/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

**MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematis Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Kelima : Menyelaraskan program dan kegiatan rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan usulan kegiatan hasil kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2020
- Keenam : Melampirkan Pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Ketujuh : Badan Pendapatan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Plt. Kepala  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Malang



**Made Arya Wedanthara, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690811 199503 1 002

Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang



**Ir. Tomie Herawanto, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah

NO	BAGIAN		KESesuaian			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>I PENDAHULUAN</b>						
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	✓			
		Proses penyusunan Renja	✓			
		Ketepatan Renja dengan RKPD dan Rencana PD	✓			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Perundang-uran 96 Tahun 2017	✓			
<b>II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu</b>						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/ review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2) Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan : 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; 2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja; 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja; 4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpendahnya atau melebihi target kinerja program / kegiatan 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah 6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu disahli untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (SK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	✓			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs Tuntutan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan audit kebutuhan Akses dan catatan penting perbedaan	✓			
2.5	Pencapaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah; serta usulan Masyarakat Tahun 2021 yang dilaksanakan di Tahun 2020	✓			
<b>III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>						
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022	✓			Kegiatan yang mengkomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai
<b>IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>						
		Menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2021 berdasarkan RKPD 2021 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diadopsi oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT maupun CSR)	✓			
<b>V PENUTUP</b>						

Mengetahui,



- 1.
- 2.

Tim Verifikasi  
**Galot Samsu Djono, S.Kom, M.Kom**  
 Penitip  
 NIP. 196603011990031005  
  
**Emma Kartika, STP**  
 Penitip  
 NIP. 19800427 200904 2 001